



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
KE *THE COMMITTEE ON FINANCE* DI PARLEMEN SWEDIA,
THE NATIONAL FINANCIAL MANAGEMENT AUTHORITY SWEDIA,
DAN *THE NATIONAL AUDIT OFFICE* SWEDIA
15 MEI 2022 S.D 21 MEI 2022
MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2021—2022**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI dibentuk kembali berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3). DPR RI memiliki tiga fungsi, anggaran; legislasi; dan pengawasan. Untuk memperkuat pelaksanaan fungsi anggaran, dibentuk Badan Anggaran. Kemudian untuk memperkuat fungsi legislasi, dibentuk Badan Legislasi. Maka untuk memperkuat fungsi pengawasan, dibentuklah Badan Akuntabilitas Keuangan Negara.

Peraturan perundang-undangan yang mendasari pembentukan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20A, ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan”. Dalam Pasal 23 E ayat (2) disebutkan bahwa “Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD, sesuai dengan kewenangannya”. Pada ayat (3) disebutkan bahwa “Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang”.

Kemudian Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3, Pasal 72 huruf d menyebutkan bahwa: “DPR bertugas, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah; dan huruf e menyebutkan “DPR membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK”.

Selanjutnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3, Pasal 112D ayat 1 menyebutkan: “BAKN bertugas: a. melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR; b. menyampaikan hasil penelaahan kepada komisi; c. menindaklanjuti hasil pembahasan komisi terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK atas permintaan komisi; dan d. memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan. Pada ayat (2) disebutkan: “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, BAKN dapat meminta penjelasan dari BPK, Pemerintah, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Kunjungan ke negara lain ini adalah salah satu proses pembelajaran dengan cara *Learning By Doing* bagi Anggota Parlemen untuk menambah wawasan dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah dan mitra kerjanya.

Hasil kunjungan teknis diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi anggota delegasi dalam melakukan fungsi pengawasan, hal ini disebabkan karena adanya *transfer of knowledge* dari negara yang dikunjungi oleh anggota delegasi.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum yang mendasari dilaksanakannya kunjungan kerja BAKN DPR RI ke Luar Negeri adalah ketentuan Pasal 145 ayat (3) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, yang menyatakan bahwa “Komisi, Gabungan Komisi, Badan Legislasi, Panitia Khusus, atau Badan Anggaran dapat mengadakan kunjungan kerja ke luar negeri dengan dukungan anggaran DPR dan persetujuan Pimpinan DPR.”

C. Profil Negara dan Otoritas Lokal yang Dikunjungi

Negara Swedia atau yang memiliki nama resmi Kerajaan Swedia merupakan sebuah negara nordik terletak di Skandinavia, Eropa Utara. Dengan luas wilayah sekitar 450.295 km persegi, negara Swedia menjadi negara terluas ketiga di kawasan Uni Eropa.

Swedia memiliki tiga level pemerintah yaitu nasional, regional dan lokal. Selain itu, terdapat juga pemerintahan di level Eropa sejak Swedia bergabung menjadi anggota Uni Eropa pada tahun 1995. Pada tingkat nasional, kekuasaan legislatif dipegang oleh *Riksdag* (parlemen pusat). Pemerintah pusat terdiri dari Perdana Menteri dan kementerian. Selain itu, terdapat sekitar 400 lembaga pemerintah pusat dan lembaga administrasi publik. Pada tingkat daerah, Swedia terbagi atas 290 pemerintah kota (*kommuner*) dan 20 pemerintah regional (*län*). Antara pemerintah kota dan pemerintah regional tidak terdapat hubungan hirarki karena masing-masing memiliki kewenangan untuk memerintah bagi dirinya

Riksdag adalah lembaga legislatif nasional dan badan pengambil keputusan tertinggi di Swedia. Sejak tahun 1971, *Riksdag* menjadi lembaga legislatif satu kamar dengan 349 anggota. Ada 15 komite parlemen dengan tugas memastikan bahwa semua item tugas parlemen dipertimbangkan secara menyeluruh sebelum keputusan diambil. Masing-masing komite parlemen memiliki 17 anggota yang mewakili partai secara proporsional dengan kekuatan relatif mereka di *Riksdag*. Salah satu komite parlemen adalah *The Committee on Finance* yang bertugas menyiapkan hal-hal terkait pedoman umum kebijakan keuangan, penetapan anggaran pemerintah pusat dan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan *Riksbank* (Bank Sentral Swedia). Juga menyiapkan hal-hal mengenai batas-batas pengeluaran untuk pos-pos pengeluaran dan perkiraan penerimaan negara. *The Committee on Finance* juga menyiapkan hal-hal terkait moneter, kredit, mata uang dan kebijakan utang nasional, pasar kredit dan keuangan, pasar asuransi komersial dan *The National Audit Office*. *The Committee on Finance* juga menangani hal-hal yang berkaitan dengan keuangan pemerintah daerah, negara sebagai pemberi kerja, statistik nasional, akuntansi, audit dan efisiensi administrasi, barang milik negara dan pengadaan publik pada umumnya, masalah keuangan administrasi tertentu dan masalah anggaran yang bersifat teknis.

The National Audit Office Swedia adalah otoritas di bawah *Riksdag* yang bertanggung jawab untuk memeriksa cara Pemerintah menggunakan uang pembayar pajak dalam kegiatan pemerintah pusat. Tujuan dari kewenangan tersebut adalah untuk membantu mendukung penggunaan yang baik dari sumber daya pemerintah pusat dan administrasi publik yang efisien. *The National Audit Office* berstatus independen. Badan ini dipimpin oleh *The Auditor General* yang ditunjuk oleh *Riksdag*. *The Auditor General* memutuskan sendiri apa yang akan diaudit. *The National Audit Office* bertanggung jawab atas salah satu elemen fungsi kontrol parlemen *Riksdag*. Memastikan bahwa Pemerintah dan otoritas publik melakukan tugas resmi mereka dengan benar adalah salah satu tugas utama *Riksdag*. *The National Audit Office* mengusulkan tindakan, tetapi Pemerintah dan *Riksdag* yang memutuskan apakah akan mengambil tindakan.

The National Audit Office memiliki empat tugas utama: Audit Keuangan, Audit Kinerja, Kerjasama Pembangunan Internasional dan Operasi Global. pada audit keuangan tahunan, *The National Audit Office* mengaudit dan mengevaluasi apakah laporan keuangan otoritas pemerintah kredibel dan benar, apakah akunnya benar dan adil, dan apakah pimpinan otoritas yang diaudit mengikuti tata cara, aturan, dan peraturan saat ini. Selain otoritas pemerintah, *The National Audit Office* mengaudit organisasi tertentu seperti Dana Warisan Swedia dan Rumah Tangga dan Pendirian Kerajaan, dan berkesempatan untuk menunjuk auditor ke perusahaan yang setidaknya lima puluh persen di bawah kepemilikan negara.

Pada audit kinerja, *The National Audit Office* mengaudit efisiensi otoritas pemerintah. Titik awal di sini adalah seberapa baik subjek audit mencapai tujuannya dan kesesuaian organisasi, operasi, proses, atau fungsi untuk tujuan tersebut. Tujuan pemeriksaan adalah untuk memastikan bahwa negara, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat umum, mendapatkan hasil yang baik atas usahanya. Faktor umum untuk semua audit kinerja adalah bahwa mereka didasarkan pada indikator masalah dan evaluasi risiko dan materialitas. Ini berarti bahwa audit diarahkan pada operasi yang berisiko tidak memenuhi tujuannya. Hal ini dapat berhubungan dengan bahwa operasi otoritas tidak hemat biaya, bahwa mereka memiliki organisasi yang tidak efisien atau bahwa mereka tidak mematuhi aturan dan tata cara.

The National Audit Office mewakili Swedia dalam konteks terkait audit internasional, dan telah ditugaskan oleh *Riksdag* untuk bekerja sama dengan kerjasama pengembangan kapasitas internasional dari *Supreme Audit Institutions* (SAI) di negara-negara berkembang. Tujuan dari keterlibatan internasional tersebut adalah untuk mendukung pengembangan badan audit profesional independen, berkontribusi pada pengembangan demokrasi, dan memperkuat kekuatan pengawasan parlemen di berbagai belahan dunia. Saat ini, *The National Audit Office* Swedia terlibat dalam proyek-proyek di Afrika dan Eropa Tenggara.

The National Audit Office Swedia juga dapat mengambil tugas, sebagai auditor eksternal di organisasi internasional. *The National Audit Office* Swedia bekerja sama dengan SAI lainnya di seluruh dunia, antara lain dalam organisasi *The International Organization of Supreme Audit Institutions* (INTOSAI). Pertukaran pengalaman dan pengetahuan yang berkelanjutan antara SAI memperkaya semua yang terlibat. Selama bertahun-tahun, *The National Audit Office* Swedia telah memimpin kelompok kerja internasional yang telah mengembangkan pedoman yang diterima secara global tentang audit keuangan untuk sektor publik. Penggunaan pedoman ini meningkatkan kualitas, dan meningkatkan kredibilitas, audit publik di seluruh dunia.

The National Financial Management Authority atau *Ekonomistyrningsverket* (ESV), bertanggung jawab untuk mengembangkan manajemen keuangan sektor publik. Ini adalah metode yang digunakan oleh Pemerintah untuk pengelolaan dan pengendalian instansi pemerintah.

ESV mengembangkan aturan akuntansi dan mengeluarkan peraturan dan pedoman umum. Setiap tahun ESV menerbitkan peringkat manajemen keuangan untuk setiap lembaga pemerintah. Peringkat ini didasarkan pada penilaian ESV tentang seberapa baik agensi mematuhi persyaratan yang ditetapkan dalam aturan akuntansi.

ESV bertanggung jawab untuk menetapkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di pemerintah pusat dan untuk pengembangan dan administrasi sistem akuntansi pemerintah pusat, Hermes. ESV berkontribusi pada pengelolaan dana struktural UE yang sempurna.

ESV juga menghasilkan dan menganalisis informasi mengenai keuangan pemerintah pusat. ESV membuat perkiraan rutin dari hasil anggaran pemerintah dan menerbitkan empat prakiraan anggaran setiap tahun. ESV menghitung, antara lain, pengeluaran pemerintah dalam kaitannya dengan pagu pengeluaran dan neraca anggaran. Tujuan ESV adalah untuk mengidentifikasi risiko apapun terhadap keuangan publik pada tahap awal.

ESV juga menjalankan kegiatan pelatihan, dukungan, dan konsultasi ekstensif di area operasional ESV. Kegiatan-kegiatan ini diarahkan baik kepada instansi pemerintah maupun Kantor Pemerintah.

D. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kunjungan kerja Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI ke Swedia adalah tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan 21 Mei 2022.

E. Koordinasi Dengan KBRI Kerajaan Swedia dan Republik Latvia

Dalam mendukung kelancaran kegiatan kunjungan teknis, kami melakukan koordinasi yang intensif dengan pihak KBRI Kerajaan Swedia dan Republik Latvia. Pihak KBRI sangat akomodatif dalam memberikan bantuan untuk memperlancar kegiatan kunjungan yang dilakukan oleh BAKN DPR RI, mulai dari korespondensi dengan institusi yang akan dikunjungi, protokoler acara, dan penunjukan staf pendamping selama kegiatan berlangsung.

F. Maksud dan Tujuan

Tujuan utama dari BAKN DPR RI berkunjung ke negara Swedia adalah sebagai berikut:

1. Memahami tugas, fungsi, wewenang dan gambaran secara umum mengenai Parlemen Swedia serta gambaran secara khusus *The Committee on Finance* yang terkait dengan akuntabilitas keuangan negara, *The National Financial Management Authority*, dan *The National Audit Office*, dalam melakukan pengawasan terhadap keuangan negara.

2. Memahami mekanisme kerja antara *The Committee on Finance* dengan *The National Audit Office*, dan bagaimana *The National Audit Office* mendukung kebutuhan parlemen dalam melakukan pengawasan atas keuangan negara.
3. Mendapatkan gambaran jenis-jenis, ruang lingkup, *time schedule* pemeriksaan keuangan negara oleh *The National Audit Office*, penyampaian hasil pemeriksaan kepada Parlemen Swedia, dan pembahasan lebih lanjut mengenai laporan hasil pemeriksaan antara Parlemen dengan *The National Audit Office*.
4. Mendapatkan gambaran bagaimana *The Committee on Finance* melakukan penelaahan/reviu atas laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh *The National Audit Office*, dan bagaimana hasil penelaahan tersebut disampaikan kepada Parlemen dan *committee* lainnya yang terkait.
5. Mendapatkan gambaran hubungan kerja antara *The Committee on Finance* dengan *committee* lain di Parlemen, khususnya terkait hasil pemeriksaan *The National Audit Office* terhadap mitra kerja *committee* lain.

II. PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA

A. Agenda Kegiatan

Agenda kunjungan kerja Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI ke Kerajaan Swedia adalah tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan 21 Mei 2022, dengan agenda pertemuan dengan *The Committee on Finance* di Parlemen Swedia, *The National Financial Management Authority*, dan *The National Audit Office* sebagai berikut.

NO	HARI/TGL JAM	KEGIATAN	KETERANGAN
1	MINGGU, 15 MEI 2022		
	21.30	Delegasi sudah berkumpul di Bandara Soetta	
	22.00 – 23.30	Check in penerbangan ke SWEDIA	

2	SENIN, 16 MEI 2022		
	00.40	Take off menuju Dubai, United Arab Emirates	Terminal 3 Soekarno Hatta
	05.40 – 08.40	Transit di Dubai, United Arab Emirates	3 Jam
	08.40	Take off menuju Swedia	Bandara Stockholm (ARN)
	13.10	Tiba di Swedia	
	17.00	Check in Hotel	
	19.30	Makan Malam	
3	SELASA, 17 MEI 2022		
	07.00 – 08.00	Sarapan di Hotel	
	09.30 – 12.00	Rapat Tim Delegasi dengan KBRI persiapan pertemuan dengan <i>The Committee on Finance</i>	
	12.00 – 13.30	Makan Siang	
	13.30 – 15.30	Melanjutkan Rapat Tim Delegasi dengan KBRI persiapan pertemuan dengan <i>The Committee on Finance</i>	
	19.00	Pertemuan dengan Kedutaan Indonesia di Stockholm, Swedia	<i>Courtesy Call</i>
4	RABU, 18 MEI 2022		
	06.00 – 07.00	Sarapan di Hotel	
	10.00 – 11.30	Pertemuan dengan <i>The Committee on Finance</i> di Parlemen Swedia	Membahas mekanisme kerja <i>The Committee on Finance</i>
	12.00 – 13.00	Makan siang	
	14.30 – 15.30	Pertemuan dengan <i>The National Financial Management Authority</i> Swedia	Membahas mekanisme kerja <i>The National Financial Management Authority</i>
	15.30	Kembali Ke Hotel	
5	KAMIS, 19 MEI 2022		
	06.00 – 07.00	Sarapan di Hotel	
	10.00 – 12.00	Rapat Tim Delegasi dengan KBRI	
	13.00 – 14.00	Makan siang	

	14.30 – 16.00	Melanjutkan Rapat Tim Delegasi dengan KBRI	
	19.30	Makan Malam	
6	JUMAT, 20 MEI 2022		
	06.00 – 07.00	Sarapan di Hotel	
	10.00 – 11.00	Rapat Tim Delegasi dengan KBRI	
	11.00 – 12.30	Makan siang	
	13.00 – 14.00	Pertemuan <i>dengan The National Audit Office Swedia</i>	Membahas mekanisme kerja <i>The National Audit Office</i>
	19.30	Makan Malam	
7	SABTU, 21 MEI 2022		
	06.00 – 07.00	Sarapan di Hotel	
	11.00 – 12.00	Rapat Tim Delegasi dengan KBRI	
	12.00 – 13.00	Makan siang	
	13.00 – 15.00	Melanjutkan Rapat Tim Delegasi dengan KBRI	
	19.00-19.30	Makan Malam	

B. Susunan Delegasi

Adapun susunan delegasi yang melaksanakan kunjungan kerja adalah sebagai berikut.

NO.	NO. ANG	N A M A	FRAKSI	JABATAN
1.	A-533	H. Wahyu Sanjaya, SE	F-Demokrat	Ketua BAKN
2.	A-201	Prof. Dr. Hendrawan Supratikno	F-PDIP	Wakil Ketua BAKN
3.	A-423	Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag., M.Si.	F-PKS	Wakil Ketua BAKN
4.	A-314	H. Mukhamad Misbakhun, S.E.,M.H.	F-GOLKAR	Anggota
5.	A-83	Ir. Irwan Ardi Hasman	F-GERINDRA	Anggota
6.	A-404	Dr. Achmad Hatari, SE., M.Si	F-NASDEM	Anggota
7.	A-26	H. Bachrudin Nasori, S.Si.,M.M.	F-PKB	Anggota

NO.	NO. ANG	N A M A	FRAKSI	JABATAN
8.	A-476	Dr. H.M. Amir Uskara, M. KES.	F-PPP	Anggota
9.	A-498	Primus Yustisio, S.E., M.A.P.	F-PAN	Anggota
10.	-	Mardi Harjo, S.E., M.S.I.	-	Kepala Bagian Sekretariat BAKN
11.	-	Nurul Istiqlal	-	Staf Sekretariat BAKN
12.	-	Febri Kuntarto, S.E., M.B.A	-	Tenaga Ahli BAKN

C. Kegiatan Yang Dilakukan

Anggota delegasi dari BAKN DPR RI berkesempatan melakukan pertemuan dengan *The Committee on Finance; The National Financial Management Authority*; dan *The National Audit Office*. Adapun informasi yang didapat oleh para anggota delegasi BAKN DPR RI adalah sebagai berikut:

1. Pertemuan dengan *The Committee on Finance*

Pertemuan dengan *The Committee on Finance* dilakukan di gedung parlemen Swedia. Pemaparan dan diskusi oleh pihak *The Committee on Finance* dipimpin oleh *Chair of the Parliament's Advisory Council to the National Audit Office*, Ms Marie Granlund.

Dalam pemaparan tersebut dijelaskan bahwa *The National Audit Office* merupakan otoritas yang melakukan kontrol untuk parlemen. *The Auditor General* yang memimpin *The National Audit Office* ditunjuk oleh parlemen, berdasarkan nominasi oleh *The Committee on the Constitution*. Selain menunjuk *Auditor General*, parlemen juga membentuk *Advisory Council* (Dewan Penasihat) bagi *The National Audit Office* yang beranggotakan 4 orang dari *The Committee on Finance* dan 4 orang dari *The Committee on the Constitution*.

Untuk isu-isu umum atau isu-isu yang berkaitan dengan tugas *The National Audit Office*, *Auditor General* berhubungan atau berkomunikasi dengan *The Committee on Finance* dan *The Committee on the Constitution*. Sementara untuk isu-isu sektoral, *Auditor General* berhubungan atau berkomunikasi langsung dengan komite yang membidangi isu tersebut.

The Auditor General setiap tahun mempresentasikan rencana audit tahunan untuk audit kinerja yang akan dilakukan kepada *The Committee on Finance*. *The National Audit Office* juga mempresentasikan laporan evaluasi tahunan atas pemeriksaan yang telah dilakukan kepada parlemen. *The Auditor General* menyusun hasil-hasil pemeriksaan yang paling penting dari audit keuangan dan audit kinerja yang telah dilakukan dalam suatu laporan tahunan, dan melaporkannya kepada parlemen. Pengawasan terhadap laporan tahunan dan laporan evaluasi tersebut didiskusikan dalam sidang terbuka antara parlemen dengan *The Auditor General*.

Laporan audit kinerja terbuka untuk publik dan disampaikan kepada parlemen dan pemerintah. Setelah menerima laporan audit, pemerintah wajib menyampaikan laporan kepada parlemen, dalam waktu 4 bulan, yang menjelaskan tindakan-tindakan apa yang telah dan akan dilakukan atas temuan dalam hasil audit tersebut. Laporan pemerintah atas setiap hasil audit dirapatkan dengan masing-masing komite yang membidangi. Anggota parlemen dapat mengajukan mosi terkait laporan pemerintah, yang dapat menjadi arahan atau rekomendasi dari parlemen untuk pemerintah.

2. Pertemuan dengan *The National Financial Management Authority*

Pertemuan dengan *The National Financial Management Authority* (ESV) dilakukan di gedung parlemen Swedia. Pemaparan dan diskusi oleh pihak ESV dipimpin oleh *Senior Advisor of the Ekonomistyrningsverket*, Ms Annika Alexandersson dan Mr Tomas Kjerf.

Dalam pemaparan tersebut dijelaskan bahwa tugas ESV adalah untuk menyediakan instruksi dan panduan tata cara akuntansi bagi instansi pemerintah, mendukung hubungan antar aplikasi yang digunakan instansi pemerintah dalam melakukan pembukuan, dan menyediakan laporan audit internal dan pengendalian internal bagi instansi pemerintah.

ESV sendiri hanya memiliki 150 pegawai namun mampu melakukan audit internal dan pengendalian internal dengan bekerja sama dengan kurang lebih 270.000 pegawai pemerintah dan mengawasi 95% dari total keuangan negara. Pemerintah memutuskan instansi mana yang harus memiliki internal audit dan meminta ESV untuk membantu pelaksanaan audit tersebut.

Internal audit berada langsung dibawah kepala atau direksi suatu instansi, dan harus bersifat independen dalam melakukan audit. Fungsi internal audit ini dipimpin oleh kepala audit yang bekerja untuk instansi tersebut. Tujuan dari internal audit ini adalah untuk mendukung manajemen dalam meningkatkan pengendalian internal serta memberikan saran atau masukan kepada manajemen.

Setiap lima tahun sekali, fungsi internal audit pada suatu instansi diperiksa dan dinilai oleh pihak luar (ESV). Pemeriksaan dan penilaian ini dimaksudkan untuk mengevaluasi apakah fungsi internal audit telah mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar akuntansi yang berlaku. ESV menginformasikan kepada pemerintah hasil pemeriksaan dan penilaian terhadap audit internal dan pengendalian internal dalam laporan tahunan.

Laporan ESV berisi opini atau keyakinan atas kelayakan pengendalian internal manajemen suatu instansi. Opini ini diberikan dalam bentuk rating, mulai dari AA (terbaik) hingga CC (paling tidak baik). ESV juga memberikan saran untuk meningkatkan pengendalian internal manajemen.

3. Pertemuan dengan *The National Audit Office*

Pertemuan dengan *The National Audit Office* dilakukan di gedung parlemen Swedia. Pemaparan dan diskusi oleh pihak *The National Audit Office* dipimpin oleh *Auditor General*, Ms Helena Lindberg.

Dalam pemaparan tersebut dijelaskan bahwa *The National Audit Office* (NAO) adalah bagian yang penting bagi parlemen dalam mengawasi pemerintah. Parlemen memberi arahan audit, menentukan alokasi anggaran, menunjuk *Auditor General*, dan membentuk dewan penasihat bagi NAO.

The Auditor General secara independen menentukan pemeriksaan apa yang akan dilakukan, instansi apa yang akan diperiksa, dan membuat kesimpulan pemeriksaan tanpa dipengaruhi pihak luar. NAO mengaudit pemerintah, penegak hukum, perusahaan milik negara, dan yayasan. Hasil pemeriksaan NAO diserahkan dan dilaporkan kepada parlemen dan pemerintah pada hari yang sama.

NAO saat ini memiliki 300 pegawai. Jenis audit yang dilakukan oleh NAO antara lain audit keuangan, audit kinerja, dan kerja sama audit internasional. NAO tidak melakukan audit kepatuhan secara tersendiri, audit kepatuhan dilakukan sebagai bagian dari audit keuangan.

Alokasi anggaran NAO tidak berupa presentase dari anggaran negara. NAO menyusun sendiri alokasi anggaran berdasarkan audit dan kegiatan yang akan dilakukan. Pada tahun 2022 ini NAO mendapatkan alokasi anggaran 350 juta krona ditambah 50 juta krona untuk kerjasama internasional.

Audit keuangan dilakukan untuk memeriksa dan mengevaluasi apakah laporan keuangan instansi pemerintah sudah tepat dan kredibel, apakah akun-akun yang ada benar dan wajar, serta untuk menilai apakah pimpinan instansi telah mematuhi ketentuan yang berlaku. Setiap tahun NAO memeriksa laporan keuangan 220 instansi pemerintah dan beberapa perusahaan milik pemerintah serta yayasan.

Audit kinerja menilai efisiensi instansi pemerintah, seberapa baik instansi pemerintah mencapai tujuannya, dan kelayakan organisasi, operasional, proses atau fungsi instansi. Tujuan dari audit kinerja adalah untuk memastikan bahwa negara, menjalankan fungsi pemerintahan dengan baik untuk kepentingan warganya. Setiap tahun NAO melakukan sekitar 30 hingga 40 audit kinerja.

Apabila ketika melakukan audit NAO menemukan indikasi kecurangan atau penipuan dan korupsi, maka NAO akan menghentikan audit dan melaporkannya kepada penegak hukum. Untuk setiap kasus suap, NAO melaporkannya kepada *National Anti-Corruption Unit*. Sementara untuk kasus-kasus kejahatan ekonomi, pajak, akuntansi, dan kasus-kasus yang berkaitan dengan negara uni-eropa lain, NAO melaporkan temuannya kepada *Economic Crime Authority*.

III. PENUTUP

Demikian laporan kunjungan kerja BAKN DPR RI ke Kerajaan Swedia yang dapat kami sampaikan. Semoga hasil kunjungan kerja ini dapat bermanfaat dan berbagai data serta informasi yang diperoleh dalam laporan ini dapat menjadi bahan rapat antara DPR RI dengan pemerintah atau BPK RI.

**Ketua Delegasi Kunjungan Kerja
BAKN DPR RI ke Kerajaan Swedia,**

ttd

H. WAHYU SANJAYA, S.E.